

**PERAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK) DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN PANGKALAN KERINCI KOTA KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

Danny Sam Alfredo
NPP. 30.0229

Asdaf Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: dannysamalfredo50@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Jojo Juhaeni, M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This thesis is entitled “The Role of Community Empowerment Institutions in Community Empowerment Activities in Pangkalan Kerinci Village, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency, Riau Province”.* **Purpose:** *This research aims to find out the role of the Pangkalan Kerinci City Village Community Empowerment Institution in community empowerment activities, especially in the fields of education, youth, sports and the arts. In addition to knowing the supporting and inhibiting factors of the role of Village Community Empowerment Institutions in community development and empowerment activities.* **Method:** *Data collection techniques used by researchers in this thesis are interviews, observation and documentation. Informants in this study were the Lurah of Pangkalan Kerinci City, Secretary of the Pangkalan Kerinci City Lurah, Leader of the Village Community Empowerment Institution in Pangkalan Kerinci City, Secretary of the Village Community Empowerment Institution in Pangkalan Kerinci City, Treasurer of the Village Community Empowerment Institution in Pangkalan Kerinci City, Coordinator for Education, Youth, Sports and Arts of the Village Community Empowerment Institution in Pangkalan Kerinci City, and the Citizen of Pangkalan Kerinci City.* **Result:** *The role of the Village Community Empowerment Institution in Pangkalan Kerinci City has been going well.* **Conclusion:** *Based on the results of the study it can be concluded that the data that the author used to obtain information that the role of the Village Community Empowerment Institution in Pangkalan Kerinci City has been going well but, in the process, there are still obstacles due to the lack of technique in processing by the Village Community Empowerment Institution in Pangkalan Kerinci City and the low level of public awareness in the development and empowerment sector, especially in the fields of education, youth, sports and the arts*

Keywords: *Village Community Empowerment Institution, Role, Development, Community Empowerment, Education, Youth, Sports and Arts*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Skripsi ini berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”. **Tujuan:** Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang Pendidikan, pemuda, olahraga dan kesenian. Selain itu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. **Metode:** Adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah teori peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat oleh Firana yang menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran dalam 4 aspek yaitu: **Hasil/Temuan:** Fasilitator, Mediator, Motivator, dan Dinamisator. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Sekretaris Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Ketua LPMK Pangkalan Kerinci Kota, Sekretaris LPMK Pangkalan Kerinci Kota, Bendahara LPMK Pangkalan Kerinci Kota, Koordinator Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian LPMK Pangkalan Kerinci Kota, dan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi bahwa peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota sudah berjalan dengan baik namun dalam prosesnya masih ditemui kendala dikarenakan kurang maksimalnya teknik dalam berproses oleh LPMK Pangkalan Kerinci Kota serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam sektor pembangunan dan pemberdayaan khususnya bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kesenian. **Kata Kunci:** Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Peran, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara merupakan Organisasi berbentuk wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah kepada semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan tersebut (Miriam Budiarjo; 2008:17). Indonesia yang dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas wilayah sekitar 1,905 km² dengan populasi sebanyak 273,5 juta jiwa yang terdiri dari berbagai budaya dan suku bangsa. 340 suku bangsa dan memiliki lebih dari 800 bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sehari-hari. Seperti tertulis secara eksplisit dalam landasan dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan. Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan daerah yang memiliki pemerintahannya masing-masing. Provinsi memiliki status selain sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah provinsi. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera di bagian tengah pantai timur dengan luas wilayah 87. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom dari pemekaran Provinsi Sumatera Tengah yang membentuk Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Provinsi Riau terdiri dari 12 kota dan kabupaten dan memiliki ragam kebudayaan. Suku adat asli dari masyarakat Riau menurut data Dinas Sosial Provinsi Riau sesuai demografis dan geografis KAT terdiri dari 5 kelompok suku, yaitu suku Talang Mamak, Suku Laut, Suku Sakai, Suku Akit, dan Suku Bonai yang tersebar luas di beberapa kabupaten dan kota Provinsi Riau. Provinsi Riau telah melaksanakan pemerintahan yang mandiri sejak terbitnya peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 1956, yang berarti pemerintah Provinsi Riau tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat terkhusus dalam hal urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten termasuk penyelenggaraan sekretariat daerah serta bagian-bagiannya (dinas-dinas dan urusan-urusan), pekerjaan umum, kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian kecil, agrarian, perburuhan, penerangan, pendidikan, pengajaran, kebudayaan, tanah, bangunan gedung, dan lain sebagainya, hingga urusan sosial dalam masyarakat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang dan berhak untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan kewenangan seluas-luasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (2), salah satu tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan atau empowerment menurut Ife (1995) adalah konsep upaya yang memberikan kewenangan, hak, kepercayaan, dan sebagainya kepada suatu individu dan/atau kelompok untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan serta mendorong pribadi menjadi lebih kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Sesuai dengan tingkat keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (Huraerah, 2011) tingkat tertinggi dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Saat ini pemberdayaan masyarakat mulai dijadikan program yang wajib diadakan di setiap daerah dikarenakan supaya masyarakat yang belum memiliki kemampuan dan belum diberdayakan segera dibenahi melalui pemberdayaan dengan bantuan seseorang baik individu maupun kelompok/organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dijelaskan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja administratif. Kelurahan sendiri dibentuk di wilayah kecamatan, dengan kedudukannya di Kecamatan dipimpin oleh Lurah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan serta memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 10 Tentang Lembaga Kemasyarakatan menyatakan bahwa kelurahan dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Pada Pasal 12 menjelaskan bahwa tugas pemenuhan tugas lembaga kemasyarakatan adalah menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk membina dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai bagian dari penguatan negara kesatuan republik Indonesia, pelayanan pemerintah yang bermutu dan dipercepat kepada masyarakat, perencana, pelaksana dan pemelihara, pengembangan dan pemanfaatan hasil pembangunan, konservasi dan pembangunan secara partisipatif, percepatan pertumbuhan dan prakarsa, serta partisipasi masyarakat dan swadaya serta kegiatan lainnya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sendiri merupakan lembaga kemasyarakatan yang terbentuk oleh, dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Pasal 20 tentang pendanaan menyebutkan bahwa sumber pendanaan untuk Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, dukungan APBN, dukungan negara, dukungan pemerintah kabupaten/kota, dukungan pemerintah provinsi, dan/atau dukungan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Ketentuan ini mengatur ketentuan lain seperti mekanisme yang terdiri dari musyawarah masyarakat untuk persetujuan, maksud dan tujuan lembaga sosial.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kurangnya sarana prasarana wadah mengembangkan diri menjadi hambatan dalam kegiatan pemberdayaan serta kurang aktifnya Lembaga Pemberdayaan yang ada diakibatkan kurangnya apresiasi terhadap pengurus LPMK itu sendiri, hingga sulitnya untuk berkegiatan. Selain itu, anggota LPMK dikenal sebagai sukarelawan yang ingin membantu tugas fungsi dari kelurahan itu sendiri terutama bidang pemberdayaan. Yang terjadi di lapangan adalah penghargaan atau apresiasi terhadap pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih sangatlah kurang. Hal ini terlihat dari honor yang diberikan kepada pengurus LPMK Pangkalan Kerinci Kota dari 2019 hingga saat ini tidak meningkat. Sedangkan biaya hidup sendiri setiap tahunnya meningkat. Di sisi lain, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam kegiatan pemberdayaan. Dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor berpengaruh dalam kegiatan pemberdayaan. Tanpa sarana dan prasarana tentunya pemberdayaan masyarakat menjadi jauh dari kata sempurna.

Tugas dan Fungsi LPMK sudah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 akan tetapi dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi ini belum berjalan dengan baik dan maksimal oleh pengurus LPMK sehingga berdampak pada peran LPMK sendiri dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan mekanisme bimbingan dan pelatihan serta dukungan yang maksimal, dan peran wajib didefinisikan dengan

jelas dan terperinci oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang ada.

Kekurangan yang didapatkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemberdayaan terhadap masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan masih belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan harapan serta tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 sehingga harapan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah belum terpenuhi secara maksimal khususnya bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun konteks kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Penelitian Joseph E Lopulalan dan Melvin Lotuasan (2022) Jurnal J-Mace Volume 2 Nomor 1 tahun 2022 berjudul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa, menemukan bahwa keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Klagete memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat tetapi kurang menunjukkan eksistensinya sehingga masyarakat kurang partisipatif dalam kegiatan pembangunan. Penelitian Damaiwana dan Ahmad Saleh menemukan bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyaluran aspirasi dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kinerja LPMK Mamasa kurang proaktif terhadap pemberdayaan dan pembangunan fisik dan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu kontraktor (Damaiwana dan Ahmad, 2020). Penelitian Amron Rehi Ranjamadu menemukan bahwa bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sudah baik, tetapi ada beberapa hambatan yaitu terbatasnya kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam memberikan informasi mengenai program-program pemberdayaan (Amron Rehi Ranjamadu, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Perbedaan Penelitian Joseph E Lopulalan dan Melvin Lotuasan (2022) Jurnal J-Mace Volume 2 Nomor 1 tahun 2022 berjudul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa dengan penelitian ini adalah tidak menitikberatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan bidang manapun sedangkan peneliti menitikberatkan di bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian. Sementara itu dalam penelitian yang di lakukan oleh Damaiwana dan Ahmad Saleh memiliki perbedaan dimana Variabel yang dinilai berbeda dengan yang diambil oleh peneliti yaitu partisipasi, sedangkan pada judul penelitian ini membahas kegiatan pemberdayaan sehingga teori yang digunakan juga berbeda. Setelah itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Amron Rehi Ranjamadu

memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu Variabel yang dinilai berbeda dengan yang di ambil oleh peneliti yaitu upaya. Pada judul penelitian terdahulu ini membahas upaya sehingga grand teori yang digunakan juga berbeda.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta faktor yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam kegiatan pemberdayaan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

II. METODE

Dilihat dari segi prosedur yang dilalui penulis dalam kegiatan penelitian, skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang beragam-ragam dan dilaksanakan secara terus-menerus hingga pada akhirnya mendapatkan data yang jenuh. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kejadian dalam suatu kondisi tertentu atau gejala sosial dengan cara memberikan paparan-paparan berupa deskripsi atau gambaran yang jelas mengenai fenomena atau gejala sosial tersebut dengan bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teori. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer didapatkan secara langsung melalui pengamatan di lapangan dengan teknik pengumpulan data secara langsung dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum peneliti melakukan penelitian. Yang dikategorikan sebagai data sekunder, yaitu melalui jurnal-jurnal internet dan buku-buku mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Teknik dalam menentukan informan yang dilakukan oleh penulis adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pemilihan informan yang mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam pengambilan sampelnya. Sedangkan *Snowball Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari jumlah informan yang awalnya sedikit lalu berkembang menjadi banyak karena kebutuhan informasi yang lebih rinci dan lebih kompleks. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dari segi cara pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah dengan teknik observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi alami, sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara yang mendalam, observasi partisipasi aktif, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peran LPMK Pangkalan Kerinci Kota dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan khususnya bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian yaitu sebagai Fasilitator, Dinamisator, Mediator, dan Motivator. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota sebagai fasilitator adalah menyediakan semua fasilitas terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat kelurahan. LPMK juga perlu menetapkan prioritas kebutuhan karena kebutuhan masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota sangatlah banyak sehingga perlu ada penetapan prioritas mana yang akan lebih dulu di laksanakan sehingga menciptakan kesejahteraan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Ketua LPMK, Koordinator LPMK Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian, dan Masyarakat Pangkalan Kerinci Kota penulis menarik kesimpulan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota sudah memenuhi tanggung jawabnya yang berperan dalam ikut serta menyusun rencana pemberdayaan dan pembangunan serta mendampingi masyarakat. LPMK juga sudah dengan baik memfasilitasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi mengenai pembangunan dan pemberdayaan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota.

Menurut Firana (2014:19-22) peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator adalah mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan kepada seluruh elemen masyarakat. Begitu pula dengan hasil-hasil usulan kegiatan pemberdayaan yang mengoptimalkan kualitas hidup khususnya bidang Pendidikan, pemuda, olahraga dan kesenian. Sosialisasi kepada masyarakat Pangkalan Kerinci Kota mengenai hasil usulan menjadi indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota memiliki peran sebagai mediator. Selain itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota juga berperan untuk menyediakan ruang pertemuan untuk menyampaikan usulan yang telah di musyawarahkan. Hal ini menjadi indikator penting bagi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota sebagai mediator.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis menyimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota sudah dengan baik mensosialisasikan kembali hasil usulan di Kelurahan kepada masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota juga sudah dengan baik menyediakan ruang pertemuan untuk menyampaikan usulan yang telah di musyawarahkan walaupun tidak terspesifik bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian.

Menurut Firana (2014:19-22) peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai motivator dalam pemberdayaan masyarakat khususnya bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) harus memotivasi atau mendorong masyarakat atau pihak luar untuk dapat sama-sama membangun dan memajukan pembangunan maupun

pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota diperlukan agar masyarakat dapat sadar betapa pentingnya pembangunan dan pemberdayaan. Selain itu, pihak-pihak terkait seperti swasta berperan juga sebagai motivator agar usaha dalam pembangunan dan pemberdayaan bidang Pendidikan, pemuda, olahraga dan kesenian semakin maju.

Membantu masyarakat untuk menganalisis masalah yang ada di kelurahan internal masyarakat maupun dengan masyarakat diluar dari Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, memotivasi masyarakat, menggerakkan swadaya gotong royong, dan meyakinkan pembuat keputusan menjadi indikator penting. Hal ini dikarenakan tidak dipungkirinya terjadi masalah antar masyarakat di Kelurahan Pangkalan Kerinci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Sekretaris Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Ketua LPMK, Bendahara LPMK, dan beberapa masyarakat, penulis menyimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota telah melaksanakan perannya untuk membantu masyarakat dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi di kelurahan. Selain itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota juga membantu mengatasinya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota juga aktif memotivasi masyarakat kelurahan, tetapi belum maksimal dalam menggerakkan swadaya gotong royong dikarenakan factor-faktor yang kurang mendukung.

Menurut Firana (2014:19-22) peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai dinamisator dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesehatan dengan cara bekerja sama dengan wasta dan masyarakat sehingga menciptakan sinergi agar dapat berlangsung pembangunan dan pemberdayaan yang hebat. Selain itu, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota sebagai dinamisator dengan menggerakkan masyarakat kelurahan agar ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang telah di rancangan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota berperan sebagai dinamisator adalah sebagai penggerak perkembangan menuju yang lebih baik lagi. Melakukan Pengembangan terhadap potensi-potensi masyarakat kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota juga harus bisa menempatkan diri di tengah masyarakat. Selain itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota berperan sebagai dinamisator memiliki indikator bijaksana melakukan pemantauan. Maksudnya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota harus dapat memilah apa yang perlu di pantau dan yang tidak perlu, termasuk mana yang prioritas untuk di pantau dan yang bukan prioritas serta perlu membangun Kerjasama antar pemerintah Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Swasta, dan masyarakat untuk perkembangan pembangunan. Hal ini dibutuhkan sebagai bentuk dukungan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota agar mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Ketua LPMK, dan beberapa masyarakat Pangkalan Kerinci Kota, penulis menarik kesimpulan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota melakukan pengembangan setiap tahunnya, walaupun beberapa masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut dirancang oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota juga sudah tepat untuk turun ke lapangan bersama masyarakat, tetapi masih kurang, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota. Kemudian, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota melakukan pemantauan dengan baik dan bijaksana agar tercipta interaksi yang baik antar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota dengan masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota. Adapun faktor-faktor baik pendukung maupun penghambat yang memengaruhi peran LPMK Pangkalan Kerinci Kota dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditemui oleh peneliti. Adapun faktor pendukungnya sesuai dengan wawancara dengan Ketua LPMK adalah Masyarakat yang aktif dan partisipatif mengikuti kegiatan pembangunan dan pemberdayaan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota mendapatkan dukungan memadai oleh Pemerintah Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota. Faktor Penghambat yang memengaruhi peran LPMK Pangkalan Kerinci Kota adalah Pekerjaan tetap kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota yang beragam sehingga membuat jadwal LPMK kerap kali tidak sinkron dengan jadwal-jadwal lainnya. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Ketua LPMK Pangkalan Kerinci Kota dan beberapa masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, masih sedikit pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga tersebut. Kemudian sesuai wawancara dengan coordinator bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kesenian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kesenian tidak terlalu menonjol disebabkan ada banyaknya bidang yang menjadi prioritas.

3.2. Upaya LPMK Pangkalan Kerinci Kota

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota untuk mengatasi hambatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian yaitu, menentukan jadwal tetap untuk kepengurusan LPMK Pangkalan Kerinci Kota, memperluas jaringan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan Pangkalan Kerinci Kota terkhusus daerah yang jauh, serta menjalankan peran sebagai kepengurusan LPMK Pangkalan Kerinci Kota lebih giat lagi.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan salah satu faktor penghambat dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota adalah kurang adanya apresiasi dari pemerintah kepada relawan yang menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Jabatan yang ada di Kepengurusan LPMK diisi oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi apresiasi terhadap para pengurus masih kurang, sedangkan inflasi setiap tahunnya meningkat. Berikut data yang diperoleh:

Tabel 1.

Daftar Honor Pengurus LPMK Pangkalan Kerinci Kota 2019-2022 (Rp)				
Tahun	2019	2020	2021	2022
Jabatan				
Ketua	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sekretaris	600.000	600.000	600.000	600.000
Bendahara	500.000	500.000	500.000	500.000
Ketua Seksi	500.000	500.000	500.000	500.000

Sumber: Arsip Kecamatan Pangkalan Kerinci 2019-2022

Dari data diatas, menunjukkan kurangnya apresiasi pemerintah baik kecamatan maupun kelurahan terhadap pengurus LPMK Pangkalan Kerinci Kota, sedangkan data inflasi di Indonesia meningkat setiap tahunnya mulai dari 2.82% pada bulan Januari 2019 hingga 5.51% pada bulan Desember 2022 (sumber: www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx). Seharusnya sering meningkatnya inflasi di Indonesia, apresiasi honor terhadap pengurus LPMK juga semakin ditingkatkan, mengingat kegiatan pada tahun 2019-2022 sangat sulit akibat adanya bencana Pandemi Covid-19.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memakai teori Firana mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang terbagi atas Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator menganalisis indikator yang ada, maka peneliti menyimpulkan bahwa setiap peran yang diembang oleh LPMK Pangkalan Kerinci Kota sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi walaupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota telah melaksanakan perannya dengan baik, pada kenyataannya yang terjadi masih banyak masyarakat belum mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Kerinci Kota adalah sebuah lembaga yang aktif di kelurahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran LPMK Pangkalan Kerinci Kota

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Fitrah Ramadhan selaku Lurah di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan beserta para pegawai atas segala bantuannya selama saya melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2023, Juni). Data Inflasi. Retrieved May 29, 2023, from Bank Indonesia: www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx

Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi ed.). (M. Budiarjo, Ed., & M. Budiarjo, Trans.) Jakarta, Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.

Damaiwana, & Saleh, A. (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Kelurahan Mamasa. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Volume 5 Nomor 1.

Firana. (2014). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji, 19-22.

Huraerah, A. (2011). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora.

Ife, J. (1995). Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & Practise (third ed.). Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.

Lopulalan, J. E., & Lotuasan, M. (2022). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klagekte Distrik Malaimsimsa. Jurnal J-MACE Volume 2 Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci. (2022). Arsip Kecamatan Pangkalan Kerinci 2019-2022.

Peraturan Pemerintah RI. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

----- (1956). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Jakarta: Menteri Kehakiman.

----- (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

----- (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ranjamadu, A. R. (2019). Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

